

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kementrian dalam negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa per 31 Desember 2022 jumlah tersebut didominasi oleh penduduk Indonesia berusia muda. Dari jumlah tersebut penduduk dengan usia paling banyak adalah pada usia 10-14 tahun dengan jumlah 24,5 juta jiwa disusul dengan usia penduduk 5-9 tahun dengan jumlah 23,4 juta jiwa. Dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia yang dibawah usia 17 tahun maka pendataan identitas diri juga meningkat pemerintah harus dapat mengejar dan memastikan bahwa pendataan masyarakat dapat terpenuhi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Nomor 2 Nomor 2 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) merupakan salah satu jenis peraturan negara yang berkaitan dengan pencatatan, perlindungan, dan pemantauan informasi publik. Untuk anak-anak yang belum menikah dan berusia antara 0 dan 17 tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten atau kota menerbitkan KIA, yang merupakan identitas resmi. Peraturan ini dibuat karena hanya akta kelahiran dianggap tidak cukup, karena tidak berfungsi sebagai bukti identitas sehari-hari seseorang dan semata-mata memberikan status hukum kepada keturunan. Setiap anak harus diberikan identitas pribadi sejak lahir, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran,

sesuai dengan Pasal 35 Pasal 27(1) dan (2) Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin bahwa data anak terhubung dengan sistem kependudukan nasional, KIA dimaksudkan untuk dijadikan KTP bagi anak-anak yang belum berusia 17 tahun dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 2016 menetapkan Program Tanda Penduduk Anak (KIA). Badan demografis dan pencatatan sipil di kabupaten atau kota adalah satu-satunya otoritas yang menerbitkan KiAs, kartu identitas resmi yang dirancang khusus untuk anak lajang berusia antara 0 dan 17 tahun. Tujuan utama kebijakan KIA adalah untuk meningkatkan pengumpulan data, menjaga, dan mendorong akses anak-anak ke layanan publik. Dengan adanya KIA, pemerintah berharap dapat menjamin bahwa setiap anak memiliki identifikasi yang sah, yang akan memfasilitasi perolehan hak mereka sebaik mungkin. Dalam upaya mengumpulkan informasi dan melindungi anak-anak mereka, orang tua dapat meminta penerbitan KIA.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah suatu alat kebijakan pemerintah keluaran PERMENDAGRI no 2 tahun 2016 yang produk dari kebijakan ini berupa kartu identitas resmi yang ditujukan khusus untuk anak 0 sampai dengan dibawah umur 17 tahun dan belum menikah yang hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Tujuan diterbitkannya kebijakan KIA yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini adalah untuk meningkatkan pendataan,

perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan menjamin anak diberikan identitas. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik guna mewujudkan hak-hak terbaik bagi anak itu sendiri. Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah berharap adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. KIA dikendalikan berdasarkan Pasal 68 dan 69 PERDA. Sesuai Pasal 68(1), individu yang berusia di bawah 17 tahun dan lajang, serta warga negara asing yang memegang status tinggal permanen, harus memiliki KIA. Peraturan ini sesuai dengan mandat KIA Permendagri No. 2 mulai tahun 2016. Namun, hanya 70% anak di Kota Semarang yang memiliki akta kelahiran pada 2015-2016, meskipun 75% anak diharuskan memiliki akta kelahiran. Pemerintah Kota Semarang tidak mencetak atau menerbitkan KIA pada saat itu karena liputannya tidak memenuhi tingkat yang diantisipasi. Namun, sejak 2017, pemerintah kota Semarang tetap berdedikasi untuk menjalankan inisiatif KIA.

Tahun 2018 Kota Semarang menjadi salah satu pelaksana program Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA) setelah pemerintah kota mampu menaikkan persentase akta kelahiran yang dimiliki anak usia 0 hingga 18 tahun menjadi 92,38%. Resolusi 471.13-257-Dukcapil-Tahun-2018, yang menetapkan 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaku edisi KIA, sesuai dengan penunjukan ini. Di Indonesia, provinsi Jawa Tengah memiliki proporsi

anak-anak dan remaja (0-19 tahun) tertinggi kedua, dengan 10.983.842 individu, atau 31,85% dari total populasi, tinggal di sana.

Kota Semarang adalah satu-satunya dari sekian banyak kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang dipilih sebagai pilot project untuk menerapkan KIA pada tahun 2018. Kota Semarang, ibu kota provinsi, dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 1.786.114, di mana 443.543 anak memenuhi syarat untuk KIA tahun itu. Sementara Kota Semarang berkinerja baik di edisi KIA, sejumlah daerah di Jawa Tengah telah mengungguli Kota Semarang. Tidak hanya beberapa kabupaten ini melampaui target penerbitan KIA, tetapi juga menghasilkan hasil yang luar biasa pada tahun 2021, menunjukkan pelaksanaan program yang efektif di tingkat lokal. Ketika membandingkan Kota Semarang dengan kabupaten lain, ada perbedaan kinerja, dan di beberapa daerah, kinerjanya lebih baik daripada Semarang.

Tabel 1.1 Jumlah Pencapaian KIA di Kota Semarang Tahun 2023

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSEN (%)
1	SEMARANG TENGAH	11.750	7.342	62,49
2	SEMARANG UTARA	28.460	18.163	63,82
3	SEMARANG TIMUR	14.994	10.415	69,46
4	GAYAMSARI	18.071	12.518	69,27
5	GENUK	35.117	23.094	65,76
6	PEDURUNGAN	48.524	36.136	74,47
7	SEMARANG SELATAN	14.693	9.300	63,30
8	CANDISARI	18.036	10.723	59,45
9	GAJAH MUNGKUR	13.599	9.665	71,07
10	TEMBALANG	49.422	32.693	66,15
11	BANYUMANIK	34.823	21.729	62,40
12	GUNUNG PATI	25.633	18.563	72,42
13	SEMARANG BARAT	35.434	23.652	66,75
14	MIJEN	21.425	11.551	53,91
15	NGALIYAN	35.475	23.412	66,00
16	TUGU	8.513	6.121	71,90
Jumlah		413.969	275.077	66,45

Sumber : LKJIP DISPENDUKCAPIL Kota Semarang tahun 2023

Berdasarkan data LKJIP diatas dapat diketahui kota Semarang memiliki pencapaian KIA pada tahun 2023 yaitu jumlah penduduk yang menjadi sasaran KIA adalah sebanyak 413.969 jiwa dengan capaian kepemilikan sebesar 275.077 keping atau sebesar 66,45% namun dalam RPJMD kota Semarang untuk 2018-2021 ditetapkan untuk target penerbitan KIA pada tahun 2021 yaitu 100% sehingga belum tercapainya target kepemilikan serta masih besarnya selisih realisasi dengan target yaitu sebesar 38%.

Tujuan kedua dari kartu identitas anak adalah perlindungan hal ini dikarenakan untuk mencegah kejahatan yang terjadi kepada anak seperti kasus kejahatan penculikan anak dan juga perdagangan anak lalu perlindungan berupa untuk menjamin pemenuhan hak anak. Menurut laporan Badan Pusat

Statistik (BPS) berjudul Statistik Kriminal 2023, penculikan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kebebasan orang yang meningkat di Indonesia sejak tahun 2022. Diperkirakan ada sekitar 1.472 kasus penculikan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya di tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika ada 206 kasus, jumlah ini meningkat drastis sebesar 614,57% (databoks.katadata.co.id). Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa ada lebih dari 100 kejadian penculikan anak di Indonesia pada tahun 2023 saja, selain itu, KPAI juga merilis data pengaduan kasus keselamatan anak yang masuk ke KPAI pada tahun 2023. Data tersebut mencakup 1800 kasus selama kurun waktu tersebut.

Tujuan ketiga dalam Kartu Identitas anak adalah peningkatan dalam pelayanan publik Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang barang, jasa, dan/atau jasa administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, tujuan ketiga dari KTP Anak adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. KIA meningkatkan pelayanan publik dengan menetapkan sejumlah kewajiban administratif, seperti bersekolah, menggunakan transportasi umum, terbang atau naik kereta api, mendapatkan buku tabungan, dan memiliki akses ke layanan kesehatan. Karena para pejabat belum mencoba menjelaskan misi KIA, publik masih belum menyadarinya.

Sosialisasi dan manfaat program KIA belum menjangkau setiap anggota masyarakat, oleh karena itu tingkat respon masyarakat masih rendah. Selain

itu, menjangkau keluarga yang kurang beruntung menghadirkan tantangan, dan banyak orang tua memilih untuk tidak mengajukan KIA untuk anak-anak mereka karena mereka bertanggung jawab atas anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah menengah pertama dan menengah atas dan akan segera menerima KTP.

Berdasarkan latar belakang diatas serta teori administrasi publik sebagai ilmu yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Meninjau kepada kebijakan publik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2016 Kartu Identitas Anak dalam BAB 2 Pasal 2 tentang tujuan Kartu Identitas Anak berisi Pemerintah menerbitkan KIA yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang pelaksanaannya ditemukan masalah dan kekurangan dalam mencapai tujuan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ,maka muncul pertanyaan penelitian yaitu mengapa tujuan program KIA belum sepenuhnya terlaksanakan dan terpenuhi di kota semarang? maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan berjudul “Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum terjangkaunya KIA bagi seluruh masyarakat dan masih rendahnya pemahaman masyarakat atas fungsi KIA.
2. Tidak tercapainya target dalam realisasi KIA .
3. Responsivitas masyarakat yang masih rendah
4. Sosialisai program yang belum efektif kepada masyarakat

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi Program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu,antara lain :

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- 2) Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1)Diharapkan bahwa penelitian ini akan berguna dalam memajukan pengetahuan dan pemahaman akademik teori administrasi publik, khususnya

yang berkaitan dengan Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu akademisi dalam mengembangkan pemahaman teoritis mereka.

2) Analisis temuan ini diharapkan dapat untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan informasi untuk pengembangan teori evaluasi program organisasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Memberikan sumbangan penelitian bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam rangka memberikan rekomendasi atau solusi dalam Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang . Selain itu, penelitian ini menjadi bahan pemikiran atau masukan bagi pegawai tentang pentingnya peningkatan penerbitan KIA.

2) Manfaat penelitian bagi peneliti adalah memenuhi tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar strata satu. Selain itu, penelitian ini bermanfaat dalam menambah kemampuan serta keterampilan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengevaluasi program dalam suatu organisasi .

3) Manfaat bagi masyarakat umum adalah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

4)Manfaat bagi Universitas Diponegoro adalah menambah informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitian dengan topik yang relevan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dalam penelitian. Studi kasus adalah studi yang akan memahami suatu fenomena atau kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi yang lengkap dengan cara mengikuti prosedur pengumpulan dan berdasarkan waktu yang ditentukan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Perlu dilakukan penelitian untuk menawarkan panduan implementasinya di bidang ini. Konsep-konsep yang dikembangkan sesuai dengan kendala arah studi membentuk kerangka pemikiran, yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk melakukan penelitian. Landasan teoritis untuk melakukan penelitian untuk menemukan jawaban yang diinginkan dikenal sebagai kerangka teoritis. Ide-ide teoritis yang membentuk dasar penelitian dan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terkait dengan kerangka teoritis ini. Dasar untuk pemecahan masalah dan penciptaan rumusan masalah adalah hubungan antara variabel. Studi ini mengkaji penerapan beberapa teori terkait karena teori-teori ini merupakan komponen penting yang mendukung.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kota semarang	Implementasi Kebijakan Publik Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.	Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif	Meskipun pemerintah daerah Kota Semarang menerbitkan KIA pada tahun 2016 dan membuat PERDA No. 4, namun tidak diberlakukan hingga tahun 2017. Masalah dengan cakupan hak milik akta kelahiran anak—yang masih hilang—adalah alasan di balik penundaan implementasi KIA.
2	Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas	Menurut Duncan (Steers, 2012:53), teori keberhasilan program menunjukkan tiga karakteristik efisiensi:	menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program KIA dalam mencapai tujuan

	Semarang (2021)	program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta faktor penghambat pelaksanaan program KIA.	mencapai tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pandangan Mengenai Faktor Pengaruh G. Shabir Cheema dan DA Rondinelli menyatakan kemandirian program (dalam Mutia, 2014:98–99). .	kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran berdasarkan kondisi realitas efektivitas program KIA pada lokus penelitian yang bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	dan integrasi belum sepenuhnya berjalan optimal, sedangkan adaptasi sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat yaitu kondisi lingkungan yang disebabkan karena pandangan bahwa anak masih bergantung pada orang tua, masih sulitnya menjangkau keluarga kurang mampu, kurangnya informasi tentang kegunaan dan manfaat KIA, dan birokrasi yang rumit.
3	Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu (2018)	Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana implementasi KIA di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu	Teori Implementasi Kebijakan Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber	Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif	Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu menyempurnakan database kependudukan dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak serta memudahkan anak

			daya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.		untuk memperoleh hak-haknya
4	IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU (2021)	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Teori Implementasi Kebijakan Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) Dalam pandangan, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum bekerja secara maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum membuat KIA karena memang belum memiliki KIA, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum bekerja maksimal dalam mengimplementasikan program Kartu Identitas Anak (KIA). masyarakat belum menyadari pentingnya KIA, belum mengetahui proses pembuatan KIA, dan masih adanya

					pungutan liar (pungli).pembuatan KIA dan pungutan liar masih dipraktikkan oleh banyak organisasi.kolektif.
5	EVALUASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA CILEGON TAHUN 2018	Penelitian ini Bertujuan untuk Mengetahui hasil Evaluasi Program KIA di Kota Cilegon Tahun 2018	Teori evaluasi menggunakan teori William Dunn (2008:429), yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan	Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif	Temuan survei menunjukkan bahwa program KIA masih kurang Belum konsisten, tetapi efektif ditandai Jam kerja yang terjadwal, sulitnya proses pengajuan, kurangnya sosialisasi melalui penempatan papan reklame di jalan raya dan lokasi terkemuka lainnya, dan kurangnya sosialisasi publik langsung melalui sosialisasi perwakilan pemerintah Kecamatan atau kotapraja
6	IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA	Tujuan dari penelitian untuk menjelaskan pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan	Pada penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan yakni teknik analisis model Miles dan Huberman yang memiliki beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik	menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini turut menggunakan	Temuan penelitian di bidang ini menunjukkan bahwa temuan tersebut bisa Ditentukan bahwa meskipun pencatatan sipil Kabupaten Dharmasraya dan pelaksanaan program ID anak oleh Dinas

		Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya	kesimpulan.	desain penelitian deskriptif	Kependudukan telah selesai, mereka tidak dilakukan sebaik yang seharusnya. Mendalam Ada tantangan yang sedang berlangsung dengan implementasi program ID anak di Dharmasraya. Itu terjadi karena tidak ada struktur program yang ditentukan di antara entitas pelaksana. Tanpa pendelegasian pekerjaan dan tugas yang ditentukan antara lembaga yang terkait erat, koordinasi dan komunikasi tidak berhasil. Kemudian, persepsi publik yang tidak menguntungkan dan kebijakan program sosial, ekonomi, dan ID anak berdampak pada bagaimana program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya.
7	Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan proyek kartu tanda	Penelitian ini membahas tentang teori efektivitas Terdiri dari tiga indikator efektivitas yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Studi ini menunjukkan bagaimana program Kartu Identitas Anak (KIA) meningkatkan kesejahteraan anak di Kecamatan

		pengenal anak di Kelurahan Wonokromo			Wonokromo, Kota Surabaya dengan menggunakan tiga indikator keberhasilan, yang menunjukkan seberapa baik program ini mencapai tujuannya. Untuk menerapkannya dalam praktik, evaluasi masih diperlukan.
8	EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (2024)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Penelitian ini membahas tentang teori efektivitas. Terdapat tiga indikator efektivitas yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.	penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel berjumlah 12 orang. Kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Menurut penelitian tersebut, faktor keberhasilan program menunjukkan seberapa sukses layanan Kartu Identitas Anak (KIA). Sebelas indikator menunjukkan hal tersebut: perencanaan berhasil karena target KIA 50% telah ditetapkan; anggaran tidak berhasil karena kurangnya blanko; evaluasi program layanan KIA tidak berhasil; tujuan dan target KIA berhasil; masyarakat tidak puas dengan target implementasi; pemerintah puas dengan pembuatan KIA; dan tujuan KIA secara keseluruhan. Mengambil inisiatif dan bekerja sama dengan UPT Dinas

					Pendidikan untuk mengizinkan pembuatan KIA bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun merupakan salah satu alasan yang mempengaruhi;
9	Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Pemerintah Kota Cimahi (2021)	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program Kartu Identitas Anak melalui penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Pemerintah Kota Cimahi beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya	Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut: [8] 1) Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan. 2) Interpretasi: manafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan diterima serta dilaksanakan. 3) Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.	penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif	Sejak diperkenalkannya Program Identitas Anak, Kota Cimahi telah ditunjuk sebagai salah satu dari lima provinsi atau kota kelas satu yang pertama kali melaksanakan program ini. Sampai saat ini, pelaksanaan Program Identitas Anak dan Paspor di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kesadaran masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya memiliki KIA; 2) Kesalahan penginputan NIK pada aplikasi SIK oleh operator saat akan melakukan pencetakan KIA; 3) Kurangnya pemahaman

					masyarakat tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang sudah beralih ke pelayanan berbasis online dengan menggunakan website dan aplikasi Sipade dan Sibenar Kota Cimahi. Setelah penelitian ini selesai, tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan KIA di wilayah Cimahi adalah sebagai berikut: 1) Penerbitan percepatan Kegiatan 2) Pengecekan ulang NIK yang telah diinput, 3) Memberikan pemahaman kepada warga tentang prosedur pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi yang sudah berbasis digital
10	Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Anak di Kota Semarang (2024)	Mengkaji efektivitas pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Semarang 2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan Kartu	Duncan menyatakan bahwa faktor berikut dapat digunakan untuk mengukur efektivitas: 1. Pencapaian tujuan 2. Integrasi 3. Adaptasi	Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Dalam hal ketepatan sasaran, Inisiatif Anak masih belum efektif karena tujuan utamanya-memperbaiki pelayanan publik bagi anak dan memperkuat pembelaan dan realisasi hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara-belum tercapai dengan baik. Selain itu, masyarakat masih belum

		Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang			mengetahui manfaat dan penerapan KIA dalam kegiatan sehari-hari. Pada tahun 2023, kepemilikan KIA masih jauh, dan metrik yang digunakan untuk mencapainya masih belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat akan manfaat KIA bagi anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah mengimplementasikan TPDK di setiap kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan proporsi kepemilikan KIA. Mereka telah melakukan jemput bola, layanan 3-in-1. Layanan jemput bola, dan layanan satu hari jadi. KIA: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menyelenggarakan KIA bekerja sama dengan 10 (sepuluh) mitra KIA yang sudah ada. Layanan KIA meliputi layanan jemput bola,
--	--	---	--	--	--

					layanan 3-in-1, dan layanan satu hari jadi.
--	--	--	--	--	---

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Angara (2016), kata "administrasi" memiliki etimologi dalam bahasa Latin (Yunani), di mana berasal dari kata "iklan" dan "pelayanan", yang berarti "layanan" dan dapat diartikan sebagai kinerja atau layanan. Sebenarnya, administrasi adalah pengumpulan, pengaturan, dan dokumentasi data dan informasi secara metodis dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap dan kontekstual. Ini disebut sebagai pekerjaan administrasi, atau pekerjaan administrasi atau kantor, dengan kata lain. Munawardi Reksohadiprawiro (1984) mengklaim bahwa: Untuk memperoleh visi yang komprehensif dan hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya, administrasi memilih administrasi yang mencakup semua pengaturan dan penetapan fakta yang rapi dan sistematis secara tertulis. (Ulbert Silalahi, 2005).

Secara garis besar, administrasi diciptakan oleh ahli teori administrasi dan saat ini dipelajari di Fakultas Ilmu Administrasi dalam konteks pendidikan tinggi. Administrasi adalah upaya kolaboratif yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. 2005 melihat Ulbert Silalahi. Oleh karena itu, administrasi dalam arti yang paling luas mengacu pada serangkaian tindakan yang diselesaikan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut definisi, untuk mencapai tujuan bersama, administrasi membutuhkan partisipasi dua atau lebih individu atau kelompok kepentingan tertentu yang menyelenggarakan pertemuan antara berbagai kelompok.

Masyarakat dapat merujuk pada negara bagian, komunitas, atau keduanya. "Publik" mengacu pada hal-hal yang ditujukan untuk masyarakat umum, seperti perusahaan publik, ruang publik, dan properti publik. Selain itu, istilah "komunitas" mencakup hal-hal seperti hubungan masyarakat, kesukarelaan, minat bersama, dll. Dalam kasus seperti itu, "negara" akan digambarkan sebagai, antara lain, badan negara, struktur negara, keuangan negara, dll. Sementara itu, masyarakat penting karena berisi banyak orang yang bertindak sesuai aturan dan memiliki pemikiran, perasaan, harapan, dan sikap yang tepat dan layak. (2006, Inu Kencana Syafii). Untuk keuntungan publik, oleh karena itu publik adalah publik. Ada warga dan bukan penduduk di masyarakat, yang memang merupakan komunitas. Warga negara dan orang lain membentuk populasi.

Administrasi publik, juga dikenal sebagai administrasi negara di Inggris, adalah bidang ilmu sosial yang berfokus pada cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif pemerintahan serta isu-isu sosial seperti kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik, tujuan negara, dan etika yang memandu administrator negara. Sederhananya, administrasi publik adalah ilmu mengelola lembaga publik. Administrasi publik dan ilmu manajemen adalah dua bidang studi yang berbeda. Sementara ilmu manajemen berfokus pada manajemen organisasi swasta, administrasi publik mempelajari organisasi publik dan pemerintah, seperti departemen dan lembaga, dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Studi ini mencakup topik-topik berikut: pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik; birokrasi;

administrasi pembangunan; ke pemerintahan daerah dan good governance. Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik, diantaranya sebagai berikut:

John M. Piffner dan Robert W. Prestus menggambarkan administrasi publik sebagai proses di mana kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan perwakilan politik dilaksanakan. Koordinasi kegiatan baik individu maupun kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah adalah definisi administrasi publik. Administrasi publik adalah proses yang berhubungan dengan penerapan kebijakan pemerintah, kemampuan, dan berbagai strategi yang memberikan arah dan tujuan pada pekerjaan banyak individu dalam skala global. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi publik meliputi pengelolaan dan tata kelola negara sebagai entitas dengan tujuan mencapai tujuan negara. Dwight Waldo mendefinisikan administrasi publik sebagai manajemen dan pengorganisasian orang dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan pemerintah..

Buku "Deddy Mulyadi" karya Nicholas Henry (2008:8) mengklaim bahwa administrasi publik adalah sintesis teori dan praktik yang canggih dengan tujuan ganda untuk memahami pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang memerintah dan mempromosikan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Tujuan administrasi publik adalah untuk melembagakan teknik manajemen yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam buku Bunda Mulyad, Chandler dan Plano (2008:3) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses

pengorganisasian dan koordinasi sumber daya publik dan staf untuk tujuan merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan pilihan yang dibuat dalam kebijakan publik. Administrasi publik, menurut Woodrow Wilson (2012:21) dalam buku Wirman Syafri, adalah praktik atau urusan urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah adalah untuk efisien.

Para ahli mengklaim bahwa penjelasan dari berbagai definisi administrasi publik menunjukkan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi sekelompok individu dalam organisasi publik melalui penerbitan kebijakan publik dalam rangka penyelesaian masalah publik, dan bahwa proses administrasi publik masih membutuhkan proses manajemen publik yang kuat untuk mencapai tujuan negara. Definisi atau kesimpulan administrasi publik yang secara signifikan memajukan pertumbuhan dan memperhatikan atau menawarkan layanan kepada publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Istilah paradigma mengacu pada gagasan yang digunakan spesialis untuk menjelaskan keadaan sains saat ini atau sudut pandang ilmiah untuk memeriksa peristiwa sosial yang telah terjadi di masyarakat. Paradigma, dalam pandangan Kuhn, adalah metode memahami realitas sosial yang dikembangkan oleh gaya penyelidikan atau pemikiran tertentu yang menghasilkan bentuk pengetahuan tertentu. Berikut ini adalah interpretasi dari enam paradigma administrasi publik.

1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Istilah "dikotomi politik dan administratif" mengacu pada paradigma pertama, yang ada antara tahun 1900 dan 1926. Paradigma ini—di mana administrasi seharusnya—adalah topik diskusi. Ada dua tokoh dalam predikat ini: Leonard D. White dan Frank J. Goodnow. Melalui makalah yang mereka tulis berjudul "Politik dan Partisipasi" (1900), Frank J. Goodnow terlibat. Melalui upaya ini, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White mengklarifikasi bahwa pemerintah akan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan bahwa kebijakan harus berpusat pada langkah-langkah yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Pembagian pemerintahan menjadi tiga cabang selanjutnya ditunjukkan oleh pembagian antara politik dan administrasi: cabang legislatif, yang mewakili kehendak rakyat; cabang eksekutif, yang melaksanakan kehendak rakyat; dan cabang yudisial, yang membantu membentuk politik cabang legislatif untuk menyelaraskannya dengan tujuan rancangan kebijakan. Paradigma tersebut menyajikan sudut pandang administrasi publik, yaitu nilai yang independen dan terfokus terhadap tujuan ekonomi dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Ada tantangan dalam mempraktikkannya; Tantangan-tantangan ini berasal dari konsentrasi eksklusif paradigma pada unsur belalang, yaitu birokrasi pemerintah, yang berarti bahwa strategi pembangunannya adalah.

2) Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma prinsip administrasi adalah paradigma kedua, yang berlaku dari tahun 1927 hingga 1937. Menurut paradigma ini, prinsip-prinsip administrasi sedang dikembangkan dan berada di puncak pengakuan dalam administrasi negara. Konsep administrasi pertama kali disajikan sebagai penekanan utama administrasi publik oleh Willoughby, Gullick, dan Urwick. Konsep

perencanaan, pengorganisasian, personel, kepemimpinan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran (POSDCORB) — yang mencakup fasilitas, perencanaan, organisasi, personel, arahan, koordinasi, pelaporan, penganggaran, dan universal di Indonesia—adalah aplikasi yang terkenal dari ide-ide ini. Paradigma ini berbeda dari paradigma I karena berpusat pada administrasi publik dan belalang. Paradigma ini menjelaskan fokus administrasi publik, yaitu fungsi dan prinsip manajemen. Ini juga memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang belalang, membuat orang percaya bahwa paradigma ini menunjukkan universalitas penekanan. Saat menerapkan paradigma ini, pentingnya fokus diprioritaskan daripada pentingnya belalang.

3) Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Gagasan bahwa ilmu politik dapat diterapkan pada administrasi negara berfungsi sebagai paradigma ketiga antara tahun 1950 dan 1970. Memulihkan hubungan konseptual antara ilmu politik dan administrasi negara adalah tujuan dari tahap ini. Topik apakah politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan diajukan oleh Morstein-Marx, editor buku *Elements of Public Administration* tahun 1946. Herbert Simon keberatan dengan modifikasi konsep administratif, menyatakan bahwa itu tidak lagi berfungsi sebagai pedoman universal. Ada perdebatan antara argumen yang berharga dari segi kebijakan dan argumen yang tidak berharga dari segi administrasi. Kedua argumen ini, pada kenyataannya, sama-sama masuk akal. Konsep administrasi publik John Gauss dihasilkan dari ini. Karena banyaknya kekurangan dalam prinsip-prinsip administrasi publik, administrasi publik kemudian menggunakan paradigma ini untuk mengembangkan ilmu politik dengan belalang dalam birokrasi

pemerintahan dan penekanan abstrak. Kekurangan di bidang administrasi publik adalah hilangnya identitas dalam prinsip-prinsip panduan profesi, yang pada gilirannya membentuk atau mengendalikan disiplin kedua belah pihak. Menurut paradigma ini, efek dominasi disiplin politik atas prinsip-prinsip administrasi menjelaskan hubungan erat antara administrasi publik dan politik, yang terbukti dalam fokus abstrak lapangan. Dalam paradigma ini, birokrasi pemerintah kemudian berubah menjadi focal point.

4) Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Administrasi negara sebagai ilmu administrasi adalah paradigma keempat yang berlaku dari tahun 1956 hingga 1970. Paradigma ini hanya memajukan ide-ide yang sudah diterima. Fokus paradigma ini mengarah pada penerapan teknologi kontemporer termasuk metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan perilaku organisasi serta analisis manajemen. Beberapa hal terjadi selama ini, seperti argumen Keith M. Henderson tahun 1960 bahwa teori organisasi harus menjadi prioritas utama administrasi negara dalam rangka mempercepat pertumbuhan pengembangan organisasi (OD) sebagai spesialisasi ilmu administrasi. Paradigma ini sedang dikembangkan dalam dua bidang: orientasi kebijakan publik dan pengembangan ilmu administrasi, yang sedang diperkuat oleh psikologi sosial. Karena dapat diterapkan pada bidang administrasi publik, yang menghasilkan abstrak belalang, evolusinya fleksibel.

5) Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-1990)

Paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara, dengan titik fokus dan belalang yang berbeda, merupakan paradigma keenam yang berubah dari tahun 1970 hingga saat ini. Tujuan utama paradigma ini adalah kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi; belalangnya adalah masalah dan kepentingan publik. Ketepatan fokus dan belalang membedakan paradigma ini dari beberapa paradigma sebelumnya..

6) Paradigma 6 : Governance (1990-sekarang)

Paradigma keenam, atau paradigma pemerintahan, diperkenalkan pada tahun 1990. Paradigma keenam, yang terbaru dari yang dikemukakan sebelumnya, didasarkan pada pengembangan ilmu administrasi publik. Panji Santosa mengidentifikasi ketiga pilar paradigma ini dalam bukunya "Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Tata Kelola yang Baik": sektor publik, sektor komersial, dan masyarakat. Pengaruh pemerintah yang mengendalikan pemerintahan inilah yang membedakan paradigma ini dari yang lain. Pergeseran tata kelola pemerintahan yang menekankan integrasi sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil ke dalam stabilitas untuk menjamin kemajuan paradigma ini untuk pemerintahan yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan paradigma administrasi publik yang kelima pada tahun 1970 ialah Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara yang titik fokus dan lokusnya telah tergambar dengan jelas. Fokus paradigma ini ialah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya ialah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Berdasarkan kerangka tersebut Program KIA yang bertujuan untuk pendataan, perlindungan dan pelayanan publik sesuai dengan paradigma ini.

1.6.4 Kebijakan Publik

Ruang lingkup penelitian kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai mata pelajaran dan bidang, seperti ekonomi, politik, ilmu sosial, budaya, hukum, dll. Selain itu, berdasarkan hierarki kebijakan publik, peraturan nasional, daerah, dan lokal dapat diterapkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Dalam hal kosakata, kebijakan publik dapat berarti banyak hal tergantung pada perspektif kita. Kebijakan publik, dalam pandangan Easton, adalah penyebaran otomatisitas dari cita-cita masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat tujuan, prinsip, dan pedoman yang menyeluruh sebagai seperangkat tujuan, prinsip, dan pedoman yang menyeluruh. Individu, sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang tindakan atau situasinya ingin mereka pengaruhi kebijakan ini dikenal sebagai kelompok sasaran. Kebijakan ini terdiri dari sejumlah keputusan terkait yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Sebuah "isu" kebijakan (masalah) yang berdampak pada pelaku kebijakan maupun politik itu sendiri disebabkan oleh latar belakang atau kejadian yang dikenal sebagai lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, pelaku kebijakan, kebijakan publik (level dan konten), dan lingkungan kebijakan semuanya akan berdampak pada seberapa efektif kebijakan publik.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Sudiro (2018:63), William N. Dunn, evaluasi istilah Kebijakan sama dengan interpretasi, penilaian, dan pelaporan numerik. Dalam hal ini, mengevaluasi manfaat dan nilai hasil kebijakan; Jadi, evaluasi kebijakan perlu menawarkan data yang akurat dan dapat dipahami mengenai pemenuhan kebijakan. Untuk lebih ringkas, Dunn menyatakan bahwa evaluasi mendorong refleksi pada nilai-nilai yang memandu pemilihan tujuan. Nilai umumnya dapat dipertanyakan dengan membaca dengan cermat tentang kesiapan tujuan dan sasaran.

William N. Dunn mencantumkan enam kriteria berikut untuk mengevaluasi kebijakan: akurasi, reaksi, pemerataan, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan.

a. Kata "efektif" (efisien) mengacu pada keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut William N. Dunn, kemanjuran adalah sejauh mana suatu opsi akan mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan kegiatan. Rasionalitas teknis selalu dievaluasi dalam hal produk atau unit layanan atau nilai moneter. (Dunn, 2003:429).

b. Jika sumber daya digunakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, efisiensi akan terjadi. Menurut William N. Dunn, efisiensi adalah ukuran kuantitas pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara upaya, yang biasanya dinyatakan dalam pengeluaran moneter, dan efisiensi, yang identik dengan rasionalitas ekonomi. Efisiensi biasanya dinilai dengan mencari tahu berapa biaya satu unit barang atau jasa. Efisiensi mengacu pada kebijakan yang memaksimalkan output dengan biaya terendah (Dunn, 2003: 430).

c. Ada berbagai metode untuk mendefinisikan kecukupan kebijakan publik yang memadai. Menurut William N. Dunn, kecukupan ditentukan oleh seberapa baik tingkat efisiensi memenuhi peluang, nilai, atau kebutuhan yang berkontribusi pada masalah (Dunn, 2003: 430). Dalam gagasan yang dijelaskan di atas, kecukupan masih dapat dikaitkan dengan efisiensi dengan mengukur sejauh mana solusi alternatif memenuhi persyaratan, nilai, atau kapasitas yang terkait dengan pemecahan masalah.

d. Demi kebijakan publik, keadilan yang diberikan dan diterima dapat dianggap memiliki arti yang sama dengan pemerataan. Menurut William N. Dunn, persyaratan kesetaraan yang dekat mencerminkan alokasi hasil dan upaya di antara berbagai kelompok sosial dan terhubung dengan alasan hukum dan sosial (Dunn, 2003: 434). Kebijakan yang terasa sangat yakin bahwa program mungkin cukup, berhasil, dan efektif asalkan biaya manfaat dibagi rata dikenal sebagai kebijakan berbasis pemerataan. Keadilan, atau keadilan, adalah kunci kesetaraan..

e. Untuk menerapkan kebijakan, seseorang harus menanggapi tujuan kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa reaksinya difokuskan pada seberapa baik kebijakan dapat mengakomodasi tuntutan, preferensi, atau nilai-nilai pengelompokan sosial tertentu (Dunn, 2003:437). Reaksi publik terhadap penerapan kebijakan menunjukkan tingkat keberhasilannya. Reaksi publik ketika efek kebijakan dirasakan dengan baik adalah dukungan.

Revisi kekuatan, otoritas, strategi, dan kepentingan aktor untuk mendukung eksekusi kebijakan adalah salah satu kekuatan, kepentingan, dan strategi mereka.

Tabel 1.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik menurut Wiliam Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah	Unit biaya,manfaat bersih, <i>rasio cost benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaianhasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah?	Biaya tetap,efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,preferensi,atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar- benar berguna atau bernilai?	program

Sumber : Dunn dalam Model-model Evaluasi Kebijakan Publik (Affrian,2020)

Dunn juga menunjukkan bahwa ada dua komponen yang terkait erat dengan penilaian kebijakan: menggunakan seperangkat nilai untuk menilai kegunaan

hasil dan menggunakan berbagai model untuk melacak hasil kebijakan dan program publik (Affrian 2020, hlm. 9). Kemudian, berdasarkan tanggal penilaian, evaluasi kebijakan dibagi menjadi tiga bagian, khususnya;

- Sebelum dilaksanakan,
- Pada waktu dilaksanakan atau disebut sebagai evaluasi proses,
- Dan sesudah dilaksanakan atau juga bisa disebut evaluasi konsekuensi (output) Dunn juga mengembangkan tiga pendekatan evaluasi yaitu :

1. Evaluasi Semu.

Teknik yang dikenal sebagai penilaian semu menggunakan teknik deskriptif untuk memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa melakukan upaya untuk mengukur keuntungan atau nilai temuan ini untuk orang-orang tertentu. Penilaian semu beroperasi di bawah premis utama bahwa besarnya manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.;

2. Evaluasi Formal.

Evaluasi formal adalah metodologi yang menggunakan teknik deskriptif untuk menghasilkan data yang tepat dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tetapi menilainya sesuai dengan tujuan program kebijakan yang dinyatakan secara resmi oleh administrator dan pembuat kebijakan. Premis utama dari penilaian resmi adalah bahwa tujuan dinyatakan secara sah dan berfungsi sebagai ukuran yang adil dari nilai atau keuntungan kebijakan program.;

3. Evaluasi Keputusan Teoritis.

Penilaian ini menggunakan metodologi deskriptif untuk menghasilkan data yang andal dan akurat mengenai hasil kebijakan yang tunduk pada evaluasi kritis oleh pelaku kebijakan yang berbeda. Evaluasi teoritis dari suatu keputusan didasarkan pada gagasan bahwa tujuan tindakan kebijakan, baik yang dinyatakan secara tegas atau implisit, adalah indikator yang dapat diandalkan dari keuntungan atau nilai kebijakan program.

Terlepas dari model penilaian Dunn, Stufflebeam memperkenalkan model penilaian CIPP pada tahun 1960-an, yang dibuat oleh Komite Pelatihan Nasional untuk penilaian Phi Delta Kappa. CIPP adalah singkatan dari konteks, input, proses, dan output. Program dilihat dan dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP dari latar belakang program setelah implementasi tetapi sebelum hasil program direalisasikan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 (empat) jenis evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Konteks (Context Evaluation).

Penilaian kontekstual, menurut Stufflebeam & Coryn (2014:312), adalah untuk mengevaluasi kebutuhan, masalah, dan tujuan mendasar program target. Komponen evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi dan mempelajari konteks program, dengan fokus pada identifikasi masalah kemunculan program. Hal ini memungkinkan kami untuk menentukan apakah program tersebut telah berkembang menjadi program yang direalisasikan dengan benar yang memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian, komponen ini digunakan untuk menilai apakah tujuan program sesuai dengan kebutuhan, menanggapi tujuan

program, dan mengamati dukungan yang timbul dari program (Mulyatiningsih, 2011: 127–129)..

Kriteria dalam evaluasi konteks secara lebih dalam adalah sebagai berikut:

- a) Kebutuhan, yaitu mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi dan akan dipenuhi oleh program yang telah direalisasikan,
- b) Dukungan lingkungan, yaitu mengidentifikasi respon lingkungan sekitar terhadap program, serta
- c) Tujuan, yaitu mengidentifikasi kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan yang dinilai (Septiani, 2020:36-37).

2. Evaluasi Masukan (Input Evaluation).

Stufflebeam & Coryn (2014:312) menyatakan bahwa tujuan penilaian input adalah untuk mengidentifikasi dan menilai sumber daya orang, uang, dan fasilitas dan infrastruktur saat ini untuk menentukan bagaimana masing-masing dari ketiga faktor ini berkontribusi pada pelaksanaan program. Komponen ini berfungsi untuk menilai masukan program, yaitu dengan menentukan apakah program telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Hal ini dicapai dengan menentukan kapasitas sumber daya program dalam hal orang, bahan, peralatan, dan anggaran (Mulyatiningsih, 2011: 129–130)..

3. Evaluasi Proses (Process Evaluation).

Menurut Stufflebeam & Coryn (2014: 312-313), dalam evaluasi proses, evaluator menilai pelaksanaan dari rencana program yang sudah ditetapkan. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai pengaplikasian program yang sudah ditetapkan dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program

tersebut, yaitu dengan melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi Produk (Product Evaluation).

Stufflebeam & Coryn (2014: 313) menyatakan bahwa evaluasi produk membantu dalam menentukan dan menilai keberhasilan program secara keseluruhan. Komponen ini berfungsi untuk mengevaluasi output program, yaitu dengan memeriksa kinerja program dalam mencapai tujuannya dan mengukur pengaruh tujuan tersebut. Dengan mengevaluasi efek dan keunggulan program, penilaian produk berusaha untuk memastikan apakah program tersebut efektif atau tidak. (Septiani, 2020:38).

1.6.6 Evaluasi Program

Arikunto & Jaber (2018:4) mendefinisikan program sebagai sistem yang dirancang dan diberlakukan dalam upaya untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau kelompok. Tindakan evaluasi diperlukan untuk menentukan seberapa baik program telah memenuhi tujuannya sebelum dapat diimplementasikan untuk mencapai rencana dan tujuan awal. Evaluasi program, menurut Suchman (dalam Ambiyar & Muharika, 2019: 39), adalah proses mencari tahu apakah suatu program berhasil membantu suatu lembaga atau kelompok mencapai tujuan awalnya. Mets (Ambiyar & Muharika, 2019: 19–20) menyatakan bahwa evaluasi program merupakan instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkontribusi pada analisis informasi untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas program yang ditawarkan oleh perusahaan atau lembaga..

Berdasarkan sejumlah definisi evaluasi program yang diberikan oleh para ahli di atas, ditentukan bahwa evaluasi program adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan menggunakan metode sistem untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menerapkan data mengenai tingkat keberhasilan program, keuntungan yang diberikannya kepada audiens target, dan kesesuaian program untuk implementasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Melalui penilaian, data mengenai pencapaian dan kekurangan program diperoleh. Dengan kata lain, penilaian yang dimaksudkan untuk memastikan keputusan yang dibuat oleh lembaga atau organisasi akan mengungkapkan tingkat efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, atau kinerja yang terakhir. (Hajaroh, 2019: 28).

1.6.7 Program Kartu Identitas Anak

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara tetapi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Pada tahun 2016 menteri dalam negeri mengeluarkan surat PERMENDAGRI no 2 tahun 2016 yang berisi tentang kartu identitas anak. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Program ini memiliki sasaran untuk anak WNI yang berumur kurang dari 5 tahun dan juga anak kurang dari 17 tahun sampai dengan 5 tahun serta anak WNA yang berumur kurang dari 5 tahun dan juga anak yang berumur kurang dari 17 tahun sampai dengan 5 tahun yang sudah memiliki izin tetap di Indonesia.

1.6.8 Persyaratan dan Tata Cara

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) menjelaskan mengenai persyaratan dan tata cara kepengurusan sebagai berikut.

1. Dalam hal anak Warga Negara Indonesia kurang dari 5 tahun sudah memiliki akte kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. Fotocopy kutipan kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/wali; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali

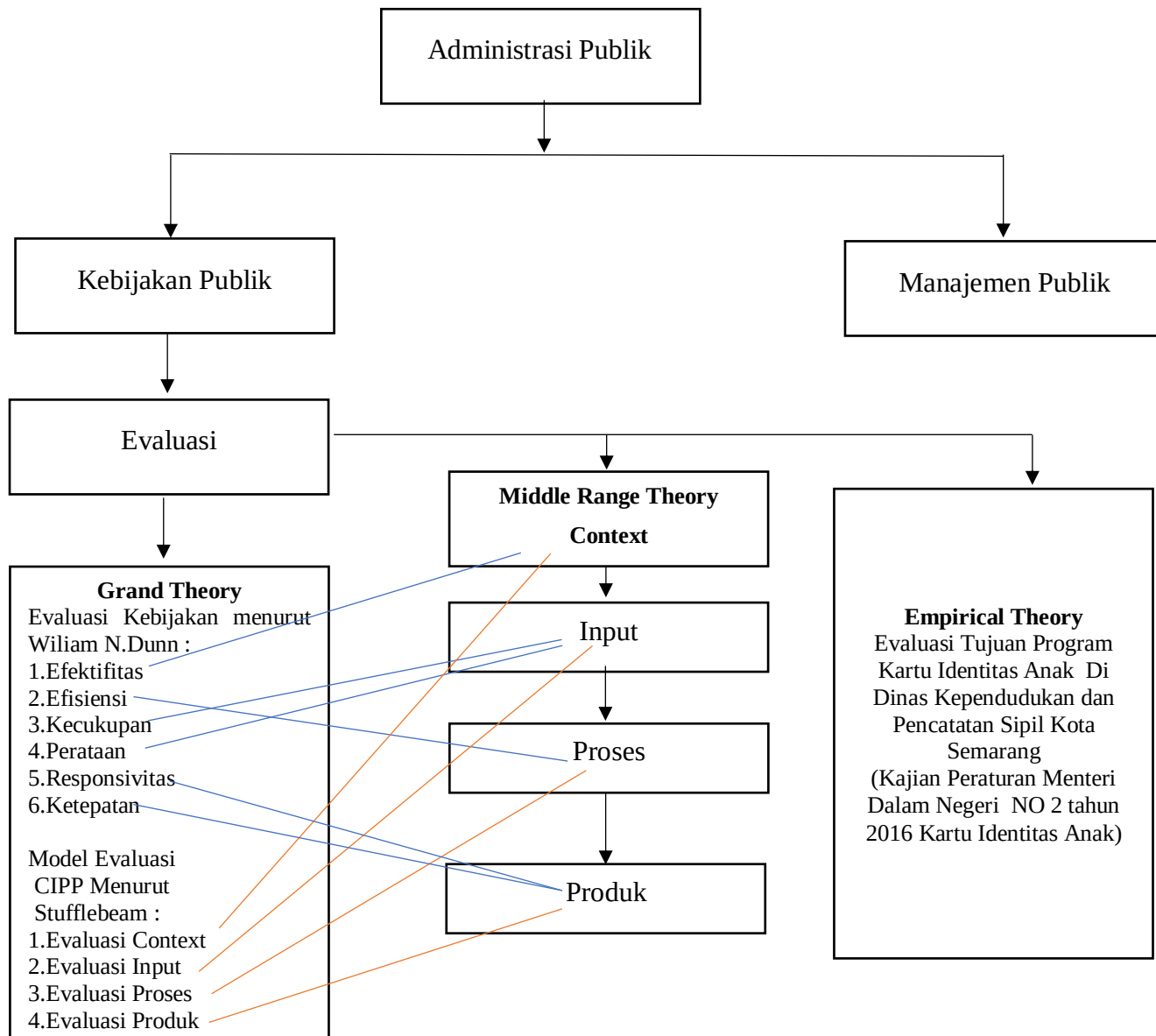
2. Dalam hal anak Warga Negara Indonesia usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

- a. Fotocopy kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/wali; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
- d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Dalam hal anak orang asing, Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:

- a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
- b. KK asli orang tua; dan
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

1.6.9 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Sugiyono (2012:31) mendefinisikan definisi operasional sebagai mengidentifikasi konstruksi atau atribut yang diteliti dan mengubahnya menjadi variabel yang terukur. Dengan menjelaskan metode tertentu untuk melakukan penelitian dan berurusan dengan konstruksi, definisi operasional memungkinkan peneliti lain untuk meningkatkan metode pengukuran konstruksi yang ada atau untuk mengulangi pengukuran dengan cara yang sama. Dengan demikian, seorang operatif dapat didefinisikan sebagai definisi yang didasarkan pada karakteristik variabel tetap. Pertanyaan penelitian penting yang perlu dijelaskan dimasukkan dalam operasi. Operasi tersebut menggambarkan fitur dan masalah signifikan dari variabel studi dengan cara yang tepat, menyeluruh, dapat diandalkan, dan ditentukan. Peneliti akan melihat evaluasi program KIA Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (DISPENDUKCAPIL) dalam penelitian ini. Implementasi program tidak memenuhi tujuannya..

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

Permasalahan	Fenomena	Gejala
Bagaimana pelaksanaan program KIA di Dispendukcapil Kota Semarang	Efektifitas	1. Ketepatan Tujuan program 2. Strategi pelaksanaan program
	Efisiensi	Pendanaan dalam pengelolaan program
	Kecukupan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana 2. Ketersediaan Sarana atau Media dalam Sosialisasi Program
	Perataan	Luasnya Jangkauan Program
	Responsivitas	Responsivitas Masyarakat terhadap program

	Ketepatan	Kesesuaian sasaran program
Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat program KIA Dispendukcapil Kota Semarang	Context	Kerjasama dalam pelaksanaan program
	Input	1. Sumber daya manusia 2. Kompetensi Pelaksana
	Proses	Kesesuaian pelaksanaan dengan SOP
	Produk	1. Hasil produk 2. Pemahaman masyarakat atas tujuan dan manfaat program KIA

1.8 Argumen Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kementerian dalam negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa per 31 Desember 2022 jumlah tersebut didominasi oleh penduduk Indonesia berusia muda. Dari jumlah tersebut penduduk dengan usia paling banyak adalah pada usia 10-14 tahun dengan jumlah 24,5 juta jiwa disusul dengan usia penduduk 5-9 tahun dengan jumlah 23,4 juta jiwa. Provinsi Jawa Tengah menempati provinsi kedua tertinggi dengan total penduduk berusia 0-19 tahun dengan kategori usia anak-anak dan remaja mencapai angka 10.983.842 atau sekitar 31,85% dari total penduduk. Dengan tingginya jumlah yang dibawah usia 17 tahun maka pendataan identitas diri juga meningkat

pemerintah harus dapat mengejar dan memastikan bahwa pendataan masyarakat dapat terpenuhi.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam mendata, melindungi dan memantau masyarakatnya dengan mengeluarkan kebijakan kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 2017, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DISPENDUKCAPIL Kota Semarang serta pemerintah Kota Semarang masih belum mencapai target realisasi program KIA. Adanya masalah-masalah dalam pelaksanaan program ini menyebabkan masih belum tercapainya target RPJMD 2016-2021 sampai sekarang hal ini dikarenakan oleh terlambatnya pelaksanaan program KIA serta masih rendahnya responsivitas masyarakat atas program ini, dengan adanya hal ini melatarbelakangi peneliti untuk membuat kajian tentang evaluasi program KIA agar realisasi KIA dapat mencapai target dan masyarakat dapat merasakan dan mengetahui manfaat dari program KIA.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan memadatkan berbagai keadaan, peristiwa, atau fenomena dalam realitas sosial masyarakat yang diteliti. Penelitian kualitatif, seperti yang ditekankan oleh Basrow dan Suwanda (2008:27), berfokus pada studi induktif data yang dikumpulkan di bidang tertentu dan berbeda untuk memberikan teori atau hipotesis yang dapat disebarluaskan secara luas. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menjawab dan memperoleh solusi atas permasalahan penelitian yang berkaitan dengan fenomena sosial. Ciri-ciri penelitian kualitatif dapat dipahami dengan mengkaji definisi metode kualitatif dan deskriptif. Menurut Arikanto (2006:15), ciri-ciri atau ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain:

1. Sifat Induktif,
2. Pertimbangan Situasi dan Reaksi Secara Holistik,
3. Memahami Perspektif Responden,
4. Penekanan pada Kemampuan Peneliti untuk Validitas,
5. Pentingnya Lingkungan Alam, dan
6. Pendekatan Berorientasi Proses.

Untuk menghindari pengukuran dan perbandingan variabel satu sama lain, informasi dari bidang ini dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan dokumen, catatan, dan catatan penelitian. Seperti yang telah disampaikan

sebelumnya, Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.9.2 Situs Penelitian

Terkait dengan fokus penelitian, keterbatasan yang menjadi pertimbangan peneliti adalah mengkaji tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai pelaksana program KIA hal ini mencakup pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, maka dari itu penekanan utama dalam kajian penelitian ini adalah Evaluasi Tujuan Program KIA di Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Informan pada penelitian ini.

Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
4. Menurut Koentjaraningrat (1986) dalam Gunawan Imam (2015:166) Informan pertama yang ditunjuk karena memang benar-benar ahli atau yang memiliki pengetahuan tentang unsur masyarakat atau kebudayaan yang diperlukan itu disebut informan kunci (key informan).

Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti dalam menentukan informan kunci sesuai dengan kriteria dalam penetapan informan kunci yaitu seseorang yang mengetahui seluk beluk dan dapat memberikan informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Maka informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Key Informan

- Sub Koordinator Identitas Penduduk
- Staff Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk

2. Informan Sekunder

- Masyarakat atau orang tua yang memiliki anak dibawah 17 tahun dan memiliki KIA
- Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3A
- Staff Kepolisian

1.9.4 Jenis Data

Sugiyono (2015) membedakan dua kategori tipe data: kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggabungkan jenis data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data Kualitatif Sugiyono (2015) mengartikan data kualitatif sebagai informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, diagram, atau gambar. Dalam penelitian ini data kualitatif meliputi nama dan alamat subjek penelitian.

2. Data Kuantitatif Sugiyono (2015) mengkarakterisasi data kuantitatif sebagai informasi dalam bentuk numerik atau data kualitatif yang telah dirangkum.

Dari dua jenis data di atas dalam penelitian ini nantinya menggunakan data kualitatif.

1.9.5 Sumber Data

Karena data dalam penelitian disajikan dalam bentuk numerik yang menunjuk besaran dan nilai variabel yang diwakilinya, maka dikategorikan sebagai data kuantitatif. Dua sumber data utama yang digunakan dalam penelitian seperti yang diungkapkan Sugiyono (2015): sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Data Primer: Sumber ini secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data dan biasanya dikumpulkan melalui wawancara dengan sumber yang dapat dipercaya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder: Sumber ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, seringkali melalui dokumen atau individu lain. Contohnya melalui perantara pihak ketiga atau berdasarkan penganalisisan dokumen yang telah tersedia. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti ialah berdasarkan literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian tengah berlangsung.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data penelitian yang melibatkan pemeriksaan secara dekat keadaan atau keadaan subjek. Data yang diperoleh dari observasi tidak hanya mencakup sikap subjek penelitian tetapi juga perilakunya. Menurut Kartono (1980:142), observasi adalah penggunaan

pengamatan dan pencatatan yang disengaja dan sistematis untuk mempelajari fenomena sosial dan gejala psikologis. Tujuan observasi adalah untuk memahami ciri-ciri dan pentingnya interaksi antara berbagai aspek perilaku manusia dalam fenomena sosial yang rumit dan pola budaya tertentu. Dalam Penelitian ini, peneliti mengamati sendiri bagaimana DIPENDUKCAPIL Kota Semarang melaksanakan program KIA di lapangan. Kajian tersebut meliputi pelaksanaan program KIA saat pendaftaran, pemberankasan dan pemberian kartu KIA. Selain itu peneliti juga mengamati sarana dan prasarana yang digunakan DISPENDUKCAPIL dalam melaksanakan tugasnya.

2. Wawancara

Wawancara, sebagai bentuk percakapan dengan orang yang diwawancara untuk mengumpulkan informasi, dilakukan dalam penelitian ini. Individu yang memiliki pengetahuan dan memahami permasalahan utama yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti yang dibahas dalam subbab sebelumnya, diwawancarai. Wawancara ialah serangkaian aktivitas untuk menelusuri data berdasarkan kegiatan wawancara.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumen menurut Gottschalk Louis (1986:38) adalah dalam penelitian sejarah, sumber tertulis seperti dokumen dibedakan dari artefak, peninggalan lukisan, peninggalan arkeologi, dan kesaksian lisan. Dokumen mencakup korespondensi negara dan resmi, termasuk perjanjian, undang-undang, dan hibah. Untuk penelitian ini dokumentasi meliputi notulen

kegiatan, laporan kerja, dan bahan relevan lainnya yang memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis melibatkan pemberian makna atau interpretasi terhadap data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengekstraksi informasi secara menyeluruh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain, sehingga hasilnya mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Sugiyono, mengutip Miles dan Huberman, mencatat bahwa aktivitas interaktif tetap ada hingga tugas selesai, sehingga menghasilkan data jenuh selama proses analisis data kualitatif. Ada tiga langkah yang terlibat dalam kegiatan analisis data.

1. Reduksi Data (data reduction)

Proses reduksi data sangat rumit dan menuntut banyak pengetahuan, kedalaman, dan pemahaman. Ini adalah metode untuk menyaring data dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Meringkas, menentukan prioritas, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, menemukan tren, dan membuang informasi yang tidak penting adalah langkah-langkah dalam proses reduksi data..

2. Penyajian Data (data display)

Data kemudian harus ditampilkan setelah reduksi data. Proses penyusunan data untuk memungkinkan analisis dan pengambilan kesimpulan disebut “display”. Data akan lebih mudah dipahami jika disusun ke dalam pola-

pola hubungan. Dalam penelitian kualitatif, seseorang dapat menggunakan kalimat yang menggambarkan kejadian di lapangan.

3. Verifikasi (concluding drawing)

Dalam analisis data kualitatif, tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Hasil yang diantisipasi dalam penelitian kualitatif sering kali menghasilkan wawasan baru. Temuan-temuan ini dapat menghasilkan gambaran yang jelas atau penjelasan deskriptif tentang suatu peristiwa atau objek yang sebelumnya ambigu atau tidak jelas, namun menjadi jelas setelah pemeriksaan yang cermat.

Pada dasarnya, analisis data kualitatif adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi secara sistematis melalui fase-fase seperti reduksi data (meringkas informasi), display data (menampilkan informasi) dan verifikasi data (menjamin atau memvalidasi informasi). Hal ini menjamin informasi tersebut dapat dipahami dan bermanfaat bagi orang lain.

1.9.8 Kualitas Data

Persyaratan kredibilitas harus dipenuhi oleh penelitian kualitatif. Modifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian akhir sangat akurat dan dapat diandalkan, sesuai dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Triangulasi adalah teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian data yang bergantung pada sumbernya. Hal ini melibatkan melakukan banyak perbandingan dan pengujian untuk mendapatkan hasil yang akurat.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menilai ketergantungan data, metodologi triangulasi membandingkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metodologi. Verifikasi data yang diperoleh dari wawancara, misalnya, dapat dilakukan dengan dokumentasi dan observasi.

3. Triangulasi waktu

Kredibilitas juga dipengaruhi oleh waktu pengumpulan data. Wawancara yang dilakukan di pagi hari, ketika narasumber masih waspada dan belum menemui banyak tantangan, kemungkinan besar akan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan valid. Oleh karena itu, data dapat diverifikasi silang untuk kredibilitasnya melalui wawancara atau observasi yang dilakukan dalam berbagai kondisi.